



e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 3 Tahun 2021 Hal. : 183-193

**NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial**available online <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>**MEMPAPUAKAN INDONESIA: MEMBANGUN PAPUA MELALUI  
PENETRASI SUMBER DAYA MANUSIA PAPUA DI TINGKAT NASIONAL****Immanuel Franthos Papare<sup>1</sup>, Sudibyo<sup>2</sup>, Pujo Widodo<sup>3</sup>**Program Studi Diplomasia Pertahanan<sup>1</sup>, Fakultas Pertahanan Pertahanan<sup>2,3</sup>**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang partisipasi orang Papua dalam membangun Indonesia terutama pada struktur pemerintahan pusat. Hal ini penting dibahas karena menyangkut eksistensi orang Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurangnya rasa memiliki dan rendahnya partisipasi dalam pembangunan serta persepsi orang Papua sebagai objek pembangunan adalah beberapa faktor pemicu timbulnya semangat disintegrasi orang Papua. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi orang Papua dalam pembangunan nasional yaitu melalui melalui penetrasi Sumber Daya Manusia (SDM), Diplomasia Publik di tingkat pusat guna menumbuhkan rasa memiliki bangsa sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Penetrasi SDM Papua dalam struktur pemerintahan pusat, terutama di Kementerian dan Lembaga Negara di Jakarta, adalah pendekatan yang lebih efektif dalam membentuk paradigma orang Papua sebagai pemilik Republik Indonesia dibandingkan dengan pengembangan SDM Papua di Tanah Papua, selain itu, secara psikologis hal ini akan mendorong pengakuan lingkungan akan keberadaan orang Papua sebagai sesama pemilik Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Papua, Sumber Daya Manusia, Diplomasia Publik, Nasionalisme

---

\*Correspondence Address : [franthos@gmail.com](mailto:franthos@gmail.com), [lare.indo@yahoo.com](mailto:lare.indo@yahoo.com),  
DOI : 10.31604/jips.v8i3.2021.183-193  
© 2021UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Gejolak masalah Papua seperti masalah separatisme, pembangunan daerah, Hak Asasi Manusia dan Otonomi Daerah serta beberapa masalah lainnya adalah isu yang timbul tenggelam. Beberapa isu muncul insidental beberapa lagi muncul secara musiman atau pada waktu tertentu khususnya saat hari-hari bersejarah bagi kelompok separatis dan simpatisannya. Gejolak masalah Papua pada dasarnya dapat diselesaikan baik secara komperensif atau secara parsial tergantung masalah yang terjadi. Semua gejolak atau permasalahan Papua yang terjadi secara langsung atau tidak menjadi hambatan pembangunan Papua. Yang dimaksud pembangunan Papua adalah pembangunan secara menyeluruh baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik seperti pembangunan SDM Etnis Papua baik secara lokal maupun nasional.

Secara historis pada masa Orde Lama pembangunan Papua berjalan lambat akibat sentralisasi kebijakan pembangunan, sehingga memunculkan berbagai tuntutan pembagian kebijakan pembangunan atau desentralisasi pembangunan. Tuntutan inilah yang kemudian mewujudkan hadirnya Undang-undang Pemerintahan di Daerah sesuai UU Nomor 5 Tahun 1974. Walaupun telah ditetapkan dengan undang-undang tersebut, namun pada kenyataannya, di masa Orde Baru-pun penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya di Papua masih dilaksanakan secara sentralistis (Bonso, 2019). Hal tersebut membuat pembangunan yang merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya

(Solikaturun, 2014) tidak berjalan dengan mulus.

Keberhasilan pembangunan Papua khususnya SDM Papua dirasakan belum semaju SDM suku lain di Indonesia, hal ini jika dihadapkan pada kenyataan bahwa suku bangsa Papua adalah salah satu suku bangsa dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang sejajar sejak 17 Agustus 1945. Walaupun beberapa putra Papua yang berhasil ditingkat nasional dapat sedikit merepresentasikan pencapaian yang cukup signifikan bagi orang Papua jika dilihat dari perbandingan dari masa orde lama, orde baru dan masa reformasi saat ini.

Tulisan ini akan mengurai bagaimana eksistensi orang Papua di Indonesia dengan segala permasalahannya serta upaya mengatasi masalahnya. Seperti diurai diatas bahwa salah satu masalah krusial adalah adanya keinginan memisahkan diri akibat kurangnya rasa memiliki Negara dan bangsa Indonesia. Di sisi lain, partisipasi orang Papua dalam struktur pemerintahan pusat khususnya pada level eselon masih sangat rendah. Tulisan ini menawarkan sebuah pemikiran yang berbeda yaitu membuat kepapuaan berada di pusat pemerintahan dibandingkan meng-Indonesia-kan Papua di tanah Papua demi merubah paradigma rakyat Indoensia baik etnis Papua maupun etnis lainnya di Indonesia.

## METODE

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan tehnik melaksanakan pengumpulan data melalui proses pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama teori diplomasi, kedua teori partisipatif, ketiga teori nasionalis,

keempat teori berpikir paradox, kelima teori *distribution of power*, serta keenam menggunakan teori kualitas SDM serta menggunakan pendekatan *soft approach*, *hard approach* dan *smart approach*.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian untuk membuat tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 dengan lokasi penelitian di Jakarta dan Jayapura, Papua.

### **Target/Subjek Penelitian**

Peneliti mengambil Subjek penelitian ini pada jumlah SDM Papua di Jakarta dikhususkan SDM yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor-kantor Kementerian Indonesia di Jakarta.

### **Prosedur**

Prosedur yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan tehnik pengumpulan data melalui proses pengamatan, wawancara dan studi dokumen.

### **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai adalah data SDM Papua di Kantor Kementerian dan Lembaga Negara, dengan cara meminta data yang dibutuhkan dari kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta di kantor Kementerian lainnya juga dari kantor Lembaga Negara di Jakarta.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisa Data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menganalisa menggunakan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan juga kerangka berfikir paradox dimana peneliti menganalisa dengan membuat perbandingan kualitas suku-suku yang berada di Indonesia dengan suku bangsa Papua dihadapkan pada rentang waktu eksistensi NKRI.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Nasionalisme adalah pemahaman untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara yaitu dengan menerapkan suatu konsep identitas bersama kelompok orang yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dan nasionalisme adalah rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Sebagian kaum nasionalis menilai suatu negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Dengan menggunakan teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalism dimana liberalism menanggapi kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori. (Rousseau, 2009) Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya promodern (Hutchinson, 1987). Nasionalisme kebangsaan Indonesia yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia termasuk orang Papua di dalamnya juga adalah hasil fenomena budaya dan politik artinya bahwa ikatan nasionalisme yang tumbuh dalam dada warga bangsa adalah sama di semua wilayah Indonesia.

Nasionalisme kebangsaan Indonesia sewajarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan. Budaya Indonesia yang

sangat beraneka ragam termasuk bahasa yang sangat berbeda seharusnya tidak menjadi hambatan bertumbuhnya nasionalisme karena kebangsaan tidak bergantung pada persamaan bahasa meski dengan adanya bahasa persatuan bisa lebih memperkuat rasa kebangsaan. (Siahaan, 2018)

Semangat Nasionalisme orang Papua diwarnai oleh sejarah yang panjang saat bangsa Indonesia merebut kembali Papua ke dalam NKRI setelah Indonesia merdeka pada 1945. Kecenderungan lemahnya semangat nasionalisme orang Papua terjadi karena beberapa faktor namun yang dominan adalah adanya fakta bahwa pada awal perebutan kembali Papua, pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan upaya resmi menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia di Papua. Tetapi patut disyukuri bahwa diluar jalur resmi, terdapat sekelompok tokoh Indonesia yang tetap berusaha untuk menanamkan semangat nasionalisme Indonesia dalam rangka mendorong integrasi Papua dengan Republik Indonesia yang baru merdeka pada masa itu. Sehingga dalam beberapa observasi ditemukan bahwa terdapat satu rasa nasionalisme yang beda yaitu nasionalisme ganda orang Papua dimana terdapat nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia (Meteray, 2012).

Nasionalisme Indonesia di Papua sudah ada sebelum berdirinya Budi Utomo 1908, hal tersebut terjadi karena pada waktu itu para penyebar agama Kristen menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Kemudian nasionalisme Indonesia di Papua menjadi lebih kuat karena terdapat banyak pemimpin Indonesia yang diasingkan oleh Belanda ke berbagai daerah di Papua dimana mereka juga mengobarkan semangat nasionalisme

Indonesia di Papua. Tetapi kemudian pembangunan nasionalisme Indonesia di Papua pada tahun 1962 melemah karena berbagai hal seperti kurangnya pendidikan formal, tekanan politik dan keamanan dari kolonial Belanda serta kurangnya pembaruan kepemimpinan di tanah Papua, sehingga proses penanaman nasionalisme Indonesia di Papua hanya dilakukan oleh orang Papua yang pemahaman nasionalismenya tidak terlalu kuat (Meteray, 2012).

Berbagai kegagalan dalam upaya menanamkan rasa nasionalisme di Papua selalu memunculkan dua pandangan dalam membangun SDM Papua yaitu pertama bagaimana perhatian pemerintah pusat melalui kebijakan dan implemetasi pembangunan SDM Papua secara nasional, kedua bagaimana pemerintah daerah mengelola SDM Papua khususnya di wilayah Papua. Kedua pandangan tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah dalam membangun SDM Papua khususnya nasionalisme orang Papua tetapi belum memunculkan upaya menjadikan orang Papua sebagai tuan di negerinya Indonesia. Belum ada upaya menjadikan orang Papua sebagai kelompok atau suku yang ikut menentukan arah pembangunan Indonesia.

Berbagai upaya menguatkan rasa nasionalisme Indonesia tersebut memberi gambaran bagaimana pemerintah berkeinginan menjadikan orang Papua sebagai orang Indonesia yang sama seperti suku lain di Indonesia atau dikenal dengan istilah "Mengindonesiakan Papua" (Liza Indriyani, 2019) yang tentunya memposisikan orang Papua sebagai subyek pembangunan.

Tetapi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa diperlukan pemikiran paradox yaitu suatu pernyataan atau beberapa pernyataan yang mengarah pada kontradiksi yang menafsirkan sesuatu dari cara berpikir yang terbalik, singkatnya berpikir paradox adalah cara berpikir keluar dari tradisi atau kebiasaan dari perspektif umum (Handy, 1994) yaitu ide berpikir membuat "Indonesia jadi Papua" atau "Mempapukan Indonesia" karena membangun Papua sama artinya dengan membangun Indonesia.

Mempapukan Indonesia adalah upaya mendorong cara berpikir masyarakat Indonesia dalam melihat Papua dan kepapuaan sebagai milik asli Indonesia yang harus dijaga dan dihargai. Cara berpikir ini akan mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepapuaan menjadi bagian yang integral bukan sebagai obyek diluar mereka.

Keberadaan SDM asli Papua di tingkat pusat bukan saja secara tidak langsung menguatkan rasa nasionalisme tetapi juga memberikan rasa memiliki Negara ini. Secara praktis SDM asli Papua yang bekerja di struktur pemerintahan pusat akan memunculkan persepsi publik bahwa SDM Papua mempunyai andil dalam menentukan kebijakan nasional bukan hanya di daerahnya. Orang Papua akan menjadi subyek dari pembangunan Indonesia bukan lagi obyek dari pembangunan.

Membangun rasa memiliki bangsa dan Negara Indonesia adalah cara yang efektif dalam membangun atau menciptakan rasa nasionalisme. Kebanggaan pada satu Negara oleh bangsanya akan tercipta ketika semua elemen mempunyai andil di dalamnya. Oleh karena itu kewenangan dan

kekuasaan yang ada sudah seyogyanya terbagi dengan baik, proporsional dan memperhatikan unsur keterwakilan seluruh anak bangsa Indonesia. Pembagian kewenangan atau andil dalam satu keputusan mempengaruhi cara berpikir masyarakat, di Negara Indonesia pasca amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 kita menganut sistem *separation of power* tetapi kita juga tetap menganut *distribution of power* demikian menurut Professor Jimli Asshiddiqie, dimana *separation power system* menganut prinsip *check and balance*. Pada kenyataannya, Indonesia tetap menganut antara *separation of power* dengan *distribution of power*. (Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arthur Mass tentang pembagian kekuasaan yaitu pada tingkat horizontal hubungan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap terjadi pemisahan dari segi kewenangan masing-masing. Sementara itu istilah pembagian kekuasaan berlaku pada hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2013)

Pemikiran mempapukan Indonesia adalah upaya membangun Papua dalam konteks menguatkan rasa nasionalisme orang Papua yaitu diantaranya dengan peningkatan kualitas SDM. Upaya seperti ini merupakan upaya yang dilakukan dengan pendekatan *soft* dan *smart* menggantikan pendekatan yang lebih keras pada masa lampau.

### **Perbandingan Kualitas & Partisipasi SDM Papua di Tingkat Nasional**

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dimana terdapat keselarasan, keserasian dan keseimbangan serta kebulatan yang utuh pada seluruh kegiatan pembangunan. Prinsip dalam pembangunan yaitu membangun manusia dan bukan sebaliknya manusia hanya untuk membangun. Dalam pembangunan, unsur manusia, unsur sosial-budaya dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan merata untuk masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Subyek dan obyek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia oleh karena itu pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. (Budiyanto, 2007)

Pembangunan dilaksanakan secara bersama oleh rakyat dan pemerintah. Rakyat atau masyarakat adalah pelaku utama pembangunan bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan pemerintah dan masyarakat seharusnya saling mendukung dan saling mengisi serta saling melengkapi pada satu kesatuan gerak langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasionalnya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah mendorong semua warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara nasional baik yang dilakukan di tingkat propinsi maupun tingkat pusat. Dengan demikian, pembangunan SDM Indonesia seyogyanya dilaksanakan secara merata guna menumbuhkan rasa memiliki Negara dan bangsa.

Pembangunan SDM Indonesia khususnya SDM Papua sampai saat ini masih dirasakan lambat jika dibandingkan suku atau etnis lain di Indonesia dihadapkan pada rentang waktu eksistensi NKRI. Banyak faktor yang mendorong lambatnya pembangunan SDM Papua tetapi yang paling menonjol adalah karena rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Papua sendiri. Rendahnya kualitas dan kuantitas rakyat Indonesia khususnya etnis Papua adalah tanggung jawab Negara, untuk itu Negara perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan khusus dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Papua secara Nasional.

### **Analogi Pohon Cemara bagi Percepatan Pembangunan Papua**

Percepatan Pembangunan adalah istilah yang mulai dikenal sejak masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaan istilah ini dijadikan sebagai nama dari salah satu Lembaga Negara yang bertugas mendorong pembangunan di Papua agar lebih cepat yaitu UP4B atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan

Papua Barat. Program dan organisasi tersebut adalah Lembaga Negara yang bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011. UP4B yang dibentuk tahun 2011-2014 bersifat adhoc, dengan tugas pokoknya adalah memberikan dukungan kepada Presiden dalam hal koordinasi, fasilitasi serta evaluasi dan pengendalian terkait percepatan pembangunan di Papua. Tugas UP4B lebih pada manajerial, bukan melaksanakan program pemerintah. Istilah percepatan pembangunan sering digunakan untuk memberi solusi pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua. Memang istilah yang retorik ini menjadi pertanyaan ketika langkah-langkah nyata yang diambil pemerintah adalah langkah pembangunan yang "biasa" bukan proses mempercepat atau percepatan.

Istilah Percepatan Pembangunan tersebut membuat masyarakat awam merasa aman dan tenang karena mendapatkan jawaban atau pernyataan retorik tentang adanya percepatan proses membangun di daerahnya kemudian menunggu hasil pembangunan yang katanya akan dipercepat itu. Karenanya kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah: apa itu percepatan pembangunan dalam persepsi orang awam?. Jika dilihat dari kalimatnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempercepat adalah proses membuat lebih cepat, sedangkan pembangunan adalah proses atau cara "perbuatan membangun", jadi artinya yang dibuat cepat adalah kegiatan membangunnya, bukan pada perencanaan atau kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kegiatan pembangunan seperti yang dimaksud dalam tulisan diatas hanya terkait pada kegiatan pembangunan fisik saja, sementara pembangunan non fisik

masih belum dapat digambarkan atau diukur secara pasti, membutuhkan data dan informasi yang lebih akurat.

Istilah "Percepatan Pembangunan" khususnya bagi Papua adalah jawaban yang diberikan untuk menjawab keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap ketertinggalan pembangunan di Papua. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa etnis yang menyandang predikat tertinggal atau "terbelakang" di antara etnis di Indonesia adalah etnis Papua karena tidak akan ada satu etnis lain mau disebut sebagai etnis yang tertinggal dibanding etnis Papua. Dalam hal mengambil langkah-langkah nyata, pemerintah seyogyanya tidak lagi membuat kebijakan pembangunan yang biasa dilakukan tetapi sudah harus dimulai dengan proses mempercepat atau percepatan yang *out of the box*, yang dapat dianalogikan dalam sebuah cerita tentang pohon Cemara dibawah ini:

Ada dua pohon Cemara, sebut saja Cemara A dan Cemara B. Kedua pohon Cemara itu ditanam pada waktu yang sama dan berdampingan. Mereka tumbuh bersama di tengah hutan tropis tetapi pohon Cemara A yang tumbuh di sisi sebelah timur, bertumbuh lebih cepat dan menjadi lebih tinggi dibanding pohon Cemara B. Kenapa? Karena pohon Cemara A mendapat sinar matahari yang lebih banyak dibanding pohon Cemara B yang terhalang oleh pohon Cemara A. Lalu pertanyaannya adalah: bagaimana caranya agar pohon Cemara B dapat bertumbuh dengan cepat dan menjadi sama tinggi dengan pohon Cemara A sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan sejajar di hutan itu? Jawabannya adalah dengan melakukan cara yang ekstrim yaitu dengan memotong pohon Cemara A agar kedua

pohon tersebut sama tinggi serta mendapatkan sinar matahari yang sama.

Cerita pohon cemara tadi menggambarkan eksistensi suku Papua diantara suku lainnya di Indonesia yang jika bertumbuh bersama kemudian berkembang secara bersama maka suku Papua akan tetap terlambat perkembangannya dibanding suku bangsa lainnya di Indonesia. Cerita pohon cemara tadi juga adalah tentang bagaimana upaya percepatan pembangunan yang mengandung arti keluar dari prosedur dan mekanisme yang sudah ada selama ini menjadi suatu tindakan perubahan yang signifikan. Dibutuhkan satu tindakan yang luar biasa bukan tindakan yang biasa dilakukan.

#### **Langkah nyata membangun SDM Papua**

Langkah nyata kadang tidak menjadi nyata karena "prosedur/aturan" yang ada. Kita semua meyakini bahwa rencana yang baik sama artinya merencanakan suatu keberhasilan tetapi terkadang aturan-aturan dan prosedur yang harus dipenuhi membuat keinginan tersebut tidak tercapai. (James T. Tedeschi, 1981). Beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan dengan cara pertama, melaksanakan membentuk tim pelaksana penetrasi SDM Papua di tingkat pusat, kedua melaksanakan koordinasi terkait rencana kerja tim, ketiga melakukan sosialisasi dan pendataan SDM Papua di kementerian dan lembaga serta organisasi pusat lainnya terkait nama personel di tiap instansi tersebut, selanjutnya tim pelaksana penetrasi SDM Papua di tingkat pusat menindak-lanjuti data yang diterima dengan melakukan upaya-upaya korespondensi dan audiensi dalam rangka mendorong

personel atau individu asli Papua di instansi pusat sekaligus monitoring pelaksanaannya.

Dalam setiap upaya selalu ditemukan kendala atau lebih tepatnya disebut tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan upaya nyata ini adalah: sesama orang Papua, birokrasi, suku lain dan adanya regulasi dalam hal pemberdayaan aparatur Negara.

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan yang paling berat adalah berasal dari orang Papua sendiri. Ide menguatkan semangat ke-Indonesiaan akan menjadi batu sandungan bagi sebagian orang Papua yang ingin merdeka, lepas dari NKRI baik itu kelompok yang secara terbuka mendukung disintegrasi maupun mereka yang secara tertutup serta simpatisan Papua Merdeka. Kelompok Papua lainnya yang mungkin menjadi tantangan bagi semangat mempuatkan Indonesia adalah mereka merasa mempunyai cara yang lebih baik atau kelompok yang mengambil keuntungan pada situasi saat ini.

Tantangan selanjutnya adalah pada penerapan mekanisme birokrasi. Di dalam struktur birokrasi ada aturan dan mekanisme baku yang menjadi model atau rujukan pembinaan karier seseorang. Ide percepatan dan penetrasi SDM Papua di tingkat pusat akan menjadi satu masalah tersendiri jika dihadapkan pada sistem birokrasi yang sudah ada.

Searah dengan teori Aristoteles yang berpendapat bahwa negara adalah suatu ikatan politik yang mengadakan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin maka dalam hal ini Indonesia sebagai



suatu persekutuan suku bangsa yang mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, terkadang tidak berjalan mulus. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara nyata kita masih terbagi dalam kehidupan kesukuan dan ikatan kekeluargaan yang kuat didalamnya. Diantara ikatan kekeluargaan dan rasa kesukuan yang kuat itu terdapat semangat memajukan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat menjadi pembanding bagi suku lainnya manakala suku Papua mendapat perlakuan istimewa dibanding suku lainnya di Indonesia. Dan akhirnya regulasi menjadi tantangan selanjutnya, dimana tiap-tiap Kementerian dan Lembaga Negara di tingkat pusat mempunyai aturan tersendiri atau regulasi penempatan jabatan dan karier yang berbeda-beda.

### **Diplomasi Publik**

Partisipasi SDM Papua pada pemerintahan di tingkat pusat dapat menjadi media atau sarana bagi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keyakinan kepada warganya yang beretnis Papua dan rakyat Indonesia lainnya bahwa pembangunan Indonesia yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia adalah milik bersama. Keterlibatan etnis Papua dalam struktur pemerintahan di tingkat pusat, juga akan menjadi semacam munisi bagi para diplomat Indonesia untuk meyakinkan dunia Internasional tentang orang Papua sebagai pemilik sah Indonesia.

Diplomasi Publik adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan keyakinan dan pengaruh bagi publik internasional (negara lain) tentang eksistensi Papua dalam Republik Indonesia. Selain itu diplomasi publik juga dapat mempromosikan kebijakan luar negeri serta memberikan keyakinan kepada aktor-aktor non-

negara seperti LSM, media, kelompok masyarakat, partai politik, parlemen, dan individu (Napitupulu, 2010) bahwa orang Papua terlibat secara integral dalam pembangunan Indonesia. Pelaksanaan diplomasi publik dilaksanakan dengan kesadaran bahwa hubungan internasional tidak lagi dipandang sebagai hubungan antar negara, tetapi juga hubungan antar komunitas internasional. Karena Diplomasi *first track* atau diplomasi pemerintah saja belum tentu akan berhasil mengirimkan pesan diplomatik kepada berbagai Negara.

Terkait permasalahan disintegrasi Papua yang juga melibatkan dunia internasional, diplomasi publik juga dapat menjadi solusi untuk memberi penjelasan atau informasi yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan diplomasi publik yang melibatkan masyarakat sangat dibutuhkan melengkapi kegiatan diplomatik tradisional. Alasan utama keterlibatan publik didasarkan pada asumsi yang sangat sederhana: pemerintah tidak selalu dapat memahami berbagai tantangan yang semakin kompleks, dengan meningkatkan diplomasi publik, diharapkan diplomasi menjadi lebih efektif dan memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas di komunitas internasional. Selain itu, pemerintah juga berharap keterlibatan publik akan membuka jalan bagi negosiasi dilaksanakan oleh perwakilan pemerintah, pada saat yang sama dapat memberikan informasi dan perspektif yang berbeda. (PR, Benny Susetyo, 2008)

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Simpulan**

Kurangnya partisipasi orang Papua dalam membangun Indonesia terutama pada struktur pemerintahan pusat selalu menempatkan orang Papua

sebagai obyek pembangunan. Kondisi saat ini belum menempatkan orang Papua sebagai subyek dari pembangunan Nasional tetapi masih sebagai obyek pembangunan. Rasa memiliki dan kebanggaan terhadap Negara Indonesia yang masih rendah dapat menjadi faktor pemicu semangat disintegrasi orang Papua. Sehingga dibutuhkan suatu langkah yang nyata dalam membangun Indonesia khususnya Papua.

Upaya membangun Papua baik fisik dan non-fisik yang dilakukan sepanjang Negara Republik Indonesia berdiri masih dirasakan lambat dibandingkan suku atau wilayah lain di Indonesia jika dihadapkan pada rentang waktu eksistensi NKRI. Rendahnya kualitas dan kuantitas rakyat Indonesia etnis Papua adalah tanggung jawab Negara, untuk itulah Negara perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan khusus untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Papua secara nasional.

Selain itu, fakta rendahnya kualitas dan kuantitas orang Papua khususnya di struktur pemerintahan tingkat pusat serta upaya Diplomasi Publik terhadap keterlibatan SDM Papua secara nasional terutama di Kementerian dan Lembaga Negara di Jakarta yang masih rendah. Untuk itu, diperlukan upaya nyata yaitu dengan melakukan percepatan penetrasi SDM Papua pada struktur pemerintahan pusat di Jakarta. Upaya ini dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam upaya membentuk paradigma orang Papua sebagai pemilik sah Republik Indonesia jika dibandingkan dengan pengembangan SDM Papua di Tanah Papua. Penetrasi SDM Papua dalam struktur pemerintahan pusat adalah langkah nyata dan signifikan serta dapat berpengaruh bagi pelaksanaan

diplomasi publik dan diplomasi pertahanan, selain itu, secara psikologis hal ini akan mendorong pengakuan lingkungan akan keberadaan orang Papua sebagai sesama pemilik Republik Indonesia.

### **Saran**

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah bahwa penetrasi SDM Papua dalam struktur pemerintahan pusat khususnya di Kementerian dan Lembaga Negara di Jakarta diperlukan guna mempercepat pembangunan Nasional khususnya pembangunan Papua. Selain itu keterlibatan SDM Papua pada struktur pemerintahan pusat dibutuhkan karena hal tersebut adalah pendekatan yang lebih efektif dalam membentuk paradigma orang Papua sebagai pemilik Republik Indonesia dibandingkan dengan pengembangan SDM Papua di Tanah Papua, dan secara psikologis hal tersebut akan mendorong pengakuan lingkungan akan keberadaan orang Papua sebagai sesama pemilik Republik Indonesia.

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat diberikan sebagai saran bagi satu langkah nyata dalam rangka menjaga semangat menjaga keutuhan NKRI. Dengan upaya ini diharapkan keinginan merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tergerus. Selain itu, anak bangsa Indonesia keturunan Papua akan berpikir sebagai subyek pembangunan Indonesia bukan lagi obyek pembangunan dari pemerintah pusat. Eksistensi orang Papua ras Melanesia akan menjadi kekuatan tersendiri bagi para diplomat Indonesia untuk meyakinkan dunia internasional tentang orang Papua dalam Negara Kesatuan Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah nyata, bukan hanya teori dan retorika belaka. Untuk itulah beberapa saran langkah nyata diatas dapat dikembangkan demi terwujudnya keindonesiaan yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bonso, H. (2019, Oktober 2). Studi Kasus Peraturan Daerah Khusus Tahun 2016. Yogyakarta: Qiara Media.

Budiyanto. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA XI. In Budiyanto, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA XI. Jakarta: Erlangga.

Damang Averroes Al-Khawarizmi. (2013, January 9). Hukum Tata Negara. Retrieved February 9, 2020, from NegaraHukum.com: <https://www.negarahukum.com/hukum/pemisahan-kekuasan-vs-pembagian-kekuasaan.html>

Handy, C. (1994). *The Age Of Paradox*. Boston, Massachusetts: Havard Bussiness School Press.

Hutchinson, J. (1987). *The Dynamics Of Cultural Nationalism*. New Zealand: Allen & Unwin Inc.

James T. Tedeschi. (1981). *Impression Management Theory and Social Psychological Research*. New York: Academic Press.

Liza Indriyani. (2019, Agustus 19). Kegagalan Pemerintah Mengindonesiakan Papua. Retrieved Agustus 08, 2020, from Kabar Papua.co: <https://kabarpapua.co/kegagalan-pemerintah-mengindonesiakan-papua/>

Meteray, B. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. In B. Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua* (pp. -). Jayapura: Universitas Cenderawasih, fkip.

Napitupulu, E. (2010, April 21). Politik Diplomasia Publik Indonesia. Retrieved February 10, 2020, from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/elvnapit/54ffb66da33311776450f906/diplomasi-publik-indonesia-1>

PR, Benny Susetyo. (2008). *Peranan Diplomasia Publik*. Jakarta: suarapembaruan.com.

Rousseau, J.-J. (2009). *The Social Contract*. Jakarta: Visi Media.

Siahaan, J. T. (2018, 11 29). News Nasional. Retrieved 02 03, 2020, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/05000091/membudidayakan-nasionalisme-dan-persatuan?page=all>

Solikatun. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Analisa Sosiologi*, 70-90